

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak, terdapat perbedaan dalam proses kegiatan sosialisasi pemilihan yang dilakukan. Hal pertama yang membedakan dalam komunikasi organisasi yang terlaksana, dimana pada pilkada 2020 KPU Kota Semarang menggunakan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang berarti berbeda dengan yang peneliti ingin fokuskan. Hal ini dikarenakan di tengah masa pandemi KPU Kota Semarang menggunakan aturan/regulasi sesuai dengan anjuran KPU Pusat. Lalu hal yang membedakan lainnya adalah pembentukan Relawan Demokrasi, dimana KPU Kota Semarang membentuk relawan demokrasi mencakup semua basis. Namun berbeda dengan KPU Kabupaten Demak yang membentuk relawan demokrasi berdasarkan 4 basis yang menjadi fokus utama sosialisasi.

Dalam Humas Pemerintahan KPU Kota Semarang melaksanakan Humas dengan baik, menjalin hubungan baik internal dan eksternal agar informasi dari kegiatan sosialisasi pemilihan tersampaikan dengan baik. Baik menjalin kerjasama dengan pihak luar serta menggunakan metode yang masyarakat mudah jumpai. Di KPU Kabupaten Demak, Humas Pemerintahan yang terbentuk ialah menjalin informasi langsung secara pribadi ke masyarakat. Hal ini merupakan bentuk kampanye jemput bola yang KPU Demak juga gunakan, kegiatan tersebut

dipengaruhi juga oleh faktor Pendidikan yang berbeda antara Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Hal ini terlihat dalam perbedaan metode sosialisasi yang digunakan, seperti yang diketahui pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemilihan ini dilakukan dalam masa pandemi Covid-19, dimana seluruh kegiatan masyarakat mengalami pembatasan kegiatan tatap muka sehingga seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring dan menggunakan media digital sebagai alternatif.

Hal inilah yang menjadi pembeda dalam proses kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, dimana KPU Kota Semarang memiliki berbagai strategi dalam menyusun sarana pengganti yang digunakan sebagai metode sosialisasi. Salah satunya ialah memperkuat penggunaan kemajuan teknologi dan media sosial dalam kegiatan sosialisasi yang telah berlangsung, seperti yang terlihat KPU Kota Semarang memanfaatkan kemudahan di era digital masa kini sebagai media penghubung antara KPU dengan masyarakat seperti: pemanfaatan media sosial, penggunaan *influencer* sebagai penghubung, penggunaan media masa seperti video tron, pamflet, pemanfaatan media internet seperti website resmi dan KPU Kota Semarang memiliki aplikasi pada *handphone*.



Gambar 5.1 Aplikasi Padewaras

Sumber: Instagram KPU Kota Semarang

Pada gambar 5.1 merupakan contoh aplikasi KPU Kota Semarang yang masyarakat dapat akses, tujuannya ialah agar masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai pilkada 2020. Begitulah cara yang digunakan KPU Kota Semarang agar masyarakat semakin dekat dengan informasi yang diberikan.

Dari seluruh metode yang digunakan terbukti KPU mampu menghasilkan sosialisasi pemilihan yang efektif di Kota Semarang meski dengan metode yang berbeda dari tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan angka partisipasi masyarakat dibanding tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 5.2 Grafik Tingkat Partisipasi Pilkada 2020

Sumber: Instagram KPU Kota Semarang

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa metode *hybrid* yang KPU Kota Semarang gunakan efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dimana naik sebanyak 3,13% dibandingkan dengan pilkada di tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan metode yang KPU Kota Semarang gunakan efektif dalam kegiatan sosialisasi, dan dapat menjadi terobosan baru dalam kegiatan sosialisasi pemilihan.

Sedangkan di KPU Kabupaten Demak terdapat perbedaan dalam proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada metode sosialisasi pemilihan yang digunakan di tengah pandemi covid-19. Yaitu pada KPU Kabupaten Demak kegiatan sosialisasi pemilihan dilakukan secara *hybrid* atau perpaduan antara tatap muka dan daring, mengingat kegiatan dilakukan di masa pembatasan kegiatan masyarakat namun dari kondisi sosial, ekonomi, dan geografis pada daerah Kabupaten Demak tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan sosialisasi hanya menggunakan metode dari saja.

Selain itu di Kabupaten Demak masih terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, petani dan kaum marginal selain itu dari tingkat pendidikan yang ber macam-macam, menjadi tantangan untuk KPU dalam mensosialisasikan pelaksanaan pilkada. Pihak KPU harus ikut terjun langsung dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam proses pelaksanaan sosialisasi, seperti pelaksanaan sosialisasi dengan kendaraan, tatap muka dengan beberapa basis dan tokoh agama, dll. KPU Kabupaten Demak bahkan sampai jemput bola, ikut terjun langsung dalam pelaksanaan sosialisasi pada kaum marginal seperti nelayan, petani, pemulung dan beberapa masyarakat yang rumahnya sulit diakses.

Dalam penyampaian materi yang disampaikan pun juga berbeda, pihak KPU Kabupaten Demak melaksanakan sosialisasi dengan banyak ide dan model. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari setiap masyarakat, mengingat masyarakat Kabupaten Demak memiliki tingkat pendidikan yang berbeda serta keterbatasan kegiatan tatap muka akibat dampak Pandemi Covid-19. Penggunaan media daring pun digunakan untuk menjangkau segmen pemilih pemula

dan generasi milenial dengan berbagai inovasi dan cara seperti mengadakan lomba foto dan lomba vlog, hal ini dikarenakan minimnya basis pemilih yang mampu mengoperasikan gadget bahkan tidak memiliki *handphone*. Namun meski begitu hal ini merupakan hal baru bagi KPU Kabupaten Demak sebagai tantangan tersendiri dalam proses sosialisasi tanpa tatap muka.

Dari proses kegiatan sosialisasi di dua tempat yaitu KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi pemilihan yang dilakukan berbeda, hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor yang melatar belakangi seperti pendidikan, geografis, sosial dan ekonomi juga di tengah Pandemi Covid-19. Kota Semarang lebih dapat mampu mengikuti perubahan dan perkembangan yang ada, dimana seluruh kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan KPU bersifat *hybrid* karena pembatasan masyarakat sehingga bentuk informasi yang diterima juga melalui media sosial, dan internet. sehingga pada saat pandemi kegiatan sosialisasi dilakukan secara daring masyarakat Kota Semarang pun tetap mengetahui dan menerima informasi.

Sedangkan di Kabupaten Demak tidak seluruh lapisan masyarakat memahami penggunaan *handphone* dan mengakses media sosial karena rendahnya tingkat ekonomi serta pendidikan yang akhirnya masih terdapat masyarakat yang tidak punya atau tidak dapat mengoperasikannya. Sehingga KPU Kabupaten Demak harus terjun langsung dan memberikan pemahaman tentang pilkada secara ringkas, padat, jelas sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat.

## 5.2. Saran

Dari proses sosialisasi pilkada 2020 saran untuk KPU Kota Semarang agar perlu dilakukan riset lebih mendalam dalam penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mensosialisasikan pemilihan kepada masyarakat agar semakin berkembang juga dalam penyelenggara Program Sosialisasi agar kedepannya lebih dimaksimalkan dalam meningkatkan program sosialisasi khususnya bagi pemilih pemula, muda, disabilitas dan semua sasaran sosialisasi, serta pemaparan anggaran agar dapat digunakan sebagai fokus dari penelitian selanjutnya. Bagi KPU Kabupaten Demak, harus semakin sering dalam memanfaatkan penggunaan sosial media sebagai penghubung antara KPU dengan masyarakat. Karena perkembangan teknologi semakin maju sehingga KPU Kabupaten Demak harus mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.